

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas: lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan, dan relevan bagi pengguna data. Data dan informasi statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan, melakukan pemantauan dan mengevaluasi program-program agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tepat, sehingga tujuan pembangunan, diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dapat dicapai dengan efektif.

Dalam Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 ditetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum Tahun 2009. Dengan demikian, Renstra Tahun 2010-2014 yang disusun Kementerian/Lembaga harus mengacu kepada RPJM Nasional 2010-2014. Perpres No. 5 Tahun 2010 juga mengatur kewajiban Kementerian/Lembaga untuk menyusun Rencana Strategis 2010-2014 dengan menyusun visi dan misi Kementerian/Lembaga yang diselaraskan dengan visi dan misi RPJMN 2010-2014. Dengan adanya Renstra sebagai dasar menyusun rencana kerja tahunan Kementerian/Lembaga maka pelaksanaan program dan kegiatan akan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien.

Renstra BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2014 disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014, serta memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sesuai Peraturan Presiden No. 5

tahun 2010, Renstra BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional di bidang statistik untuk kurun waktu 2010-2014. Renstra BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2014 menjadi acuan umum bagi seluruh jajaran BPS Provinsi Kalimantan Tengah dan para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara kegiatan statistik dalam melaksanakan pembangunan nasional di bidang statistik selama lima tahun ke depan. Renstra juga sebagai dasar bagi BPS Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan kewajiban sebagai penyedia data dan informasi statistik. Untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra perlu dijabarkan secara lebih rinci ke dalam dokumen rencana tahunan melalui Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

Ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, tepat waktu, dan makin cepat disajikan merupakan tuntutan permintaan masyarakat dewasa ini. Hal ini merupakan tantangan bagi BPS Provinsi Kalimantan Tengah dan para penyelenggara kegiatan statistik untuk selalu meningkatkan mutu penyediaan data dan informasi statistik sekaligus mutu pelayanannya. Untuk itu, BPS Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan di bidang statistik yang tertuang dalam Renstra BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2014.

B. Kondisi Umum

Sejalan dengan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, langkah penguatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan menjadi pilihan strategis. Proses perencanaan memerlukan data dan informasi statistik yang berkualitas. Oleh karena itu, ketersediaan data dan informasi statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi rujukan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta

dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik dan amanat UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional (SSN). Tujuan diterbitkannya SK Kepala BPS tersebut antara lain:

- (a) agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal;
- (b) menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara statistik; dan
- (c) agar tercipta suatu Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

Salah satu upaya BPS Provinsi Kalimantan Tengah untuk mewujudkan SSN antara lain melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, serta dengan lembaga-lembaga internasional. Koordinasi dan kerjasama dimaksud dilaksanakan atas dasar kemitraan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Jejaring tersebut merupakan kekuatan yang terus dikembangkan dalam rangka pembangunan nasional di bidang statistik.

Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, rinci, mudah dipahami, dan tepat waktu. Tuntutan kebutuhan data dan informasi statistik tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, namun secara bertahap terus diupayakan ketersediaannya. Dalam lima tahun ke depan akan dilaksanakan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik untuk penguatan sistem data dan informasi pembangunan nasional yang sejalan dengan RPJM Nasional Tahun 2010-2014, seperti dituangkan dalam Buku II RPJM Nasional Tahun 2010-2014, BAB XI. Penguatan sistem data dan

informasi pembangunan memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian keberhasilan pembangunan nasional.

Upaya pengembangan yang dilakukan BPS Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2009 telah menghasilkan beragam data dan indikator sosial-ekonomi. Indikator sosial-ekonomi dihasilkan melalui Sensus Penduduk (SP), Sensus Pertanian (ST), Sensus Ekonomi (SE), dan berbagai survei di bidang sosial-ekonomi dan kependudukan. Semua indikator sosial-ekonomi tersebut telah dapat dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu.

BPS Provinsi Kalimantan Tengah juga memenuhi kebutuhan pemerintah yang tidak diagendakan sebelumnya, diantaranya Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) 2005, Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008, dan Pendataan Usaha Tani 2009 untuk mendukung program-program khusus, seperti Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan sejenisnya.

BPS Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan hasil kegiatan statistik kepada masyarakat melalui *press release* Berita Resmi Statistik (BRS) yang meliputi informasi statistik penting seperti inflasi, ekspor, impor, pariwisata, pertumbuhan ekonomi, produksi padi dan palawija, angka kemiskinan, dan pengangguran. Selain itu BPS Provinsi Kalimantan Tengah juga melakukan diseminasi data dan informasi statistik baik melalui media cetak maupun elektronik.

Dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang menjadi tanggung jawab BPS Provinsi Kalimantan Tengah secara intensif guna mencegah pemborosan sumber daya. Pengawasan dilakukan dengan meningkatkan pembinaan terhadap pengelolaan administrasi keuangan dan barang dalam rangka menuju tertib administrasi dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan.

C. Potensi dan Permasalahan

C.1. Potensi yang Dimiliki

Secara kelembagaan, BPS telah ditegaskan sebagai instansi vertikal melalui Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar baik di pusat maupun di daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional, baik di pusat maupun daerah. BPS menjadi badan yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, BPS mengelola Perguruan Tinggi yang menghasilkan tenaga statistik profesional setiap tahun, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS). BPS juga mempunyai Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Statistik, yang berfungsi mengembangkan kompetensi SDM aparatur BPS maupun instansi pemerintah lainnya. Kedua unit tersebut merupakan potensi yang terus dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan SDM statistik. BPS Provinsi Kalimantan Tengah menjadi perpanjangan BPS dalam penerimaan mahasiswa STIS, perlu memberikan dukungan dengan melakukan promosi lebih lagi ke SMU-

SMU setempat maupun kabupaten/kota untuk menjaring calon mahasiswa STIS baru asal Kalimantan Tengah lebih banyak setiap tahun.

Kemajuan TIK yang pesat sangat potensial untuk menunjang kegiatan BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Peralatan dan perlengkapan untuk keperluan pengumpulan data, pengolahan data, maupun diseminasi data berbasis TIK mutakhir yang dimiliki BPS Provinsi Kalimantan Tengah merupakan potensi untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat ketersediaan data dan informasi statistik.

Pengembangan juga dilakukan bagi potensi eksternal. Dewasa ini, data dan informasi statistik secara resmi digunakan pemerintah sebagai rujukan untuk perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan, maupun evaluasi pembangunan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang memuat sejumlah indikator kunci sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, memerlukan ketersediaan data dan informasi statistik pada tingkat wilayah pemerintahan terkecil.

Sejalan dengan kondisi tersebut, secara nasional kepedulian masyarakat Kalimantan Tengah terhadap data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS Provinsi Kalimantan Tengah semakin meningkat, dan menjadi tuntutan yang tidak dapat dihindari. Menyikapi hal ini pemerintah dalam RPJM Nasional Tahun 2010-2014 menempatkan penguatan sistem data dan informasi statistik sebagai bagian dari sistem pendukung manajemen pembangunan nasional di Provinsi Kalimantan Tengah.

Lembaga-lembaga internasional dibawah *United Nations* (antara lain UNDP, UNICEF, UNFPA, UNSD), *World Bank*, *Asian Development Bank*, EuroStat, AusAid, USAid, JICA, ASEAN Stat, dan lain-lain juga memberi bantuan dalam pembangunan statistik di Indonesia.

Millennium Development Goals (MDG's) yang telah disepakati oleh sebagian besar negara termasuk Indonesia, menjadi pendorong bagi

penyelenggara maupun pemerhati statistik untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam menilai pencapaian kinerja pembangunan, demikian juga dengan BPS baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. Hal ini memperkuat kesadaran nasional akan pentingnya SSN yang terpadu, andal, efektif dan efisien.

C.2. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas data mencakup permasalahan internal maupun eksternal. Permasalahan internal yang menonjol adalah terbatasnya SDM statistik yang profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugas, terutama di kabupaten yang jauh dari ibu kota provinsi. Permasalahan internal lainnya adalah sarana dan prasarana TIK yang dimiliki BPS belum seluruhnya sesuai dengan perkembangan teknologi terkini.

Permasalahan eksternal yang menonjol adalah rendahnya kesadaran responden dalam memberikan informasi dengan jujur, yang menyebabkan kualitas data yang dihasilkan BPS belum optimal. Di samping itu tidak tercapainya target sampel yang disebabkan oleh keengganan untuk dijadikan responden, menyebabkan response rate yang rendah terutama pada pelaku ekonomi. Permasalahan eksternal lain adalah belum terpenuhinya peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistik wilayah kecil (*small area statistics*), termasuk data mikro. Untuk memenuhi kebutuhan data mikro, BPS terkendala dengan Undang-undang No. 16 Tahun 1997 tentang statistik yang tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu, peraturan ini juga diterapkan di kalangan perstatistikan Internasional seluruh dunia. Sementara itu, ada pula anggapan masyarakat bahwa BPS adalah sumber dari segala sumber informasi. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi BPS.

Koordinasi antar instansi masih belum optimal, sehingga terjadi duplikasi penyelenggaraan kegiatan statistik yang mengakibatkan penggunaan anggaran yang kurang efisien.

Permasalahan penting lainnya yaitu belum optimalnya implementasi empat prinsip dasar dari sepuluh prinsip dasar penyelenggaraan statistik resmi yang direkomendasikan oleh PBB, antara lain :

- (i) *National Statistical Offices* (NSO) berhak untuk membetulkan dan mengklarifikasi apabila terjadi kekeliruan tafsir dan penyalahgunaan statistik.
- (ii) Informasi statistik diperoleh dari berbagai sumber baik melalui sensus, survei maupun catatan administrasi di mana NSO bertanggung jawab terhadap kualitas, ketepatan waktu, biaya dan beban pada responden.
- (iii) Koordinasi di antara penyelenggara statistik dan NSO adalah penting untuk mencapai sistem statistik yang konsisten dan efisien.
- (iv) Kerjasama bilateral dan multilateral dalam bidang statistik dianjurkan dalam kerangka perbaikan sistem statistik nasional di semua negara.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN BPS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. Visi BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Visi BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2014 dibangun dengan memperhatikan berbagai kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan yang dihadapi dari pihak luar dengan landasan pemikiran proaktif. Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat akan data dan informasi, serta memperhatikan kesiapan SDM penyelenggara statistik dan kecenderungan pembatasan akses terhadap data dari responden/obyek kegiatan statistik.

Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, maka Visi BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2014 disepakati sebagai berikut:

“Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”

“The Agent of Trustworthy Statistical Data for All”

BPS adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menyediakan dan melakukan koordinasi ketersediaan data dan informasi statistik pada lingkup nasional maupun daerah. Kata “pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. Kata “data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (*impartial*).

Dengan visi tersebut eksistensi BPS Provinsi Kalimantan Tengah sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. BPS Provinsi Kalimantan Tengah bukan hanya bagian dari pemerintah, tapi juga bagian dari keseluruhan masyarakat dan aspek kehidupan. Di samping itu, visi ini juga memberikan ruang yang cukup bagi peran serta berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik.

Proses penyediaan data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS Provinsi Kalimantan Tengah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang disebarluaskan melalui berbagai media dan berbagai cara agar pemanfaatannya berdaya jangkau luas, di dalam maupun di luar negeri.

B. Misi BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Pernyataan misi merupakan penjabaran serta rencana pelaksanaan program dan kegiatan agar mampu mencapai visi yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan visi BPS Provinsi Kalimantan Tengah, maka misi pembangunan nasional statistik Indonesia mencakup:

1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien;
2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia;
3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak; dan

5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka SSN yang efektif dan efisien.

Misi pertama merujuk pada filosofi dasar bahwa untuk mewujudkan visi, BPS Provinsi Kalimantan Tengah memerlukan landasan hukum yang kuat. Saat ini banyak perubahan yang mendasar yang menuju pada pentingnya peninjauan kembali Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Misi kedua, SDM dan TIK menjadi dua pilar penting dalam penyelenggaraan SSN. BPS melalui STIS menghasilkan SDM yang profesional di bidang statistik dan komputasi statistik. Dengan dukungan TIK, maka SDM yang ada mampu mengimplemtasikan SSN secara efektif dan efisien.

Misi ketiga, BPS Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyelenggarakan statistik nasional mengacu pada 10 prinsip dasar yang direkomendasi PBB, yang di antaranya bahwa BPS harus menghasilkan data yang didasarkan pada metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Misi keempat, BPS Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan prima. Misi ini menjadi bagian penting dan strategis dalam mewujudkan visi BPS Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu sebagai pelopor penyedia data dan informasi statistik untuk semua.

Misi kelima, BPS Provinsi Kalimantan Tengah sebagai penanggung jawab terlaksananya SSN di Provinsi Kalimantan Tengah, perlu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan efektif dan efisien.

C. Tujuan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyediakan data dan informasi

statistik pada skala regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan statistik.

Tujuan utama dalam pembangunan nasional di bidang statistik lima tahun ke depan meliputi empat tujuan yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas;
2. Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien;
3. Penguatan teknologi informasi dan komunikasi serta sarana kerja; dan
4. Meningkatkan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan.

Dalam rangka mengantisipasi lingkungan strategis yang berkembang, maka pembangunan statistik dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan menerapkan program Statcap CERDAS (*Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia*). Empat pilar reformasi birokrasi dilakukan dalam tempo 2010-2014, meliputi: (i). Peningkatan kualitas data; (ii). Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; (iii). Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta sarana kerja; dan (iv). Penguatan kelembagaan dan hubungan dengan sumber data dan pengguna data.

Tujuan pertama pembangunan statistik menuntut BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, relevan, mutakhir, dan berkesinambungan yang dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Tujuan pertama ini akan diperkuat oleh pilar pertama RB yaitu peningkatan kualitas data.

Tujuan kedua terkait dengan peran BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dalam terselenggaranya SSN, BPS berperan sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Dengan demikian, fungsi BPS

sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh semua pihak.

Tujuan kedua ini akan diperkuat oleh pilar keempat reformasi birokrasi yaitu penguatan kelembagaan dan hubungan dengan sumber data dan pengguna data. Tujuan ketiga berupa Penguatan TIK serta sarana kerja; menjadi syarat penting dalam menghadapi era globalisasi di saat ini. Keberhasilan upaya peningkatan kualitas data dan informasi statistik ini tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik.

Tujuan ketiga ini akan diperkuat oleh pilar ketiga RB yaitu penguatan TIK serta sarana kerja. Tujuan keempat terkait dengan peningkatan kapasitas SDM BPS, dalam rangka mendukung peningkatan kualitas data dan informasi statistik. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah harus terus dilakukan.

Tujuan keempat ini akan diperkuat dengan pilar kedua RB yaitu pembinaan dan peningkatan kualitas SDM. Untuk terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) maka dipandang perlu untuk menetapkan secara spesifik indikator dan target dari setiap tujuan BPS. Indikator dan target dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Tujuan dan Target Pembangunan Statistik

No	Tujuan		Target				
	Uraian	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS Prov Kalteng	-	80%	85%	85%	90%
2	Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien	Persentase konsumen yang merasa puas dengan layanan data BPS Prov Kalteng	-	80%	85%	85%	90%
3	Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja	Jumlah Satker yang mempunyai situs web yang terhubung secara online	-	15	15	15	15
4	Meningkatkan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan	Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1	50%	55%	60%	65%	75%

D. Sasaran Strategis BPS

Secara ringkas sasaran strategis pembangunan statistik nasional Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dari tujuan pertama: "Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas". Adalah :
 - 1.1. Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu
 Dengan indikator sasaran:
 - 1.1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik ekonomi makro;
 - 1.1.2. Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik ekonomi makro; dan
 - 1.1.3. Persentase publikasi statistik ekonomi makro yang release sesuai jadwal.

- 1.2. Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Dengan indikator sasaran:

- 1.2.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
- 1.2.2. Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data Sosial dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- 1.2.3. Persentase publikasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang release sesuai jadwal.

- 1.3. Meningkatkan metodologi sensus dan survey serta pemasukan dokumen

Dengan indikator sasaran:

- 1.3.1. Persentase peta wilayah administrasi dan blok sensus yang mutakhir;
- 1.3.2. Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data; dan Persentase; dan
- 1.3.3. Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan survei statistik.

2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: “Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien”.

Adalah :

- 2.1. Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik

Dengan indikator sasaran:

- 2.1.1. Jumlah studi konsistensi data sosial dan data ekonomi;
- 2.1.2. Jumlah judul publikasi statistik yang mempunyai ISSN/ISBN; dan
- 2.1.3. Jumlah tenaga fungsional statistisi dengan kualifikasi tingkat ahli.

- 2.2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik

Dengan indikator sasaran:

- 2.2.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui *Website* BPS;
- 2.2.2. Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS;
- 2.2.3. Jumlah pengunjung yang datang ke Pelayanan Statistik Terpadu; dan
- 2.2.4. Jumlah Publikasi Elektronik yang diupload di Website BPS.

- 2.3. Meningkatkan hubungan dengan pengguna data

Dengan indikator sasaran :

- 2.3.1 Persentase konsumen data yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya;
- 2.3.2 Banyaknya kunjungan tamu dari dalam dan luar negeri; dan
- 2.3.3 Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS.

3. Sasaran strategis dari tujuan ketiga: “Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja”. Adalah :

- 3.1. Peningkatan Kualitas Pengolahan Data dan Informasi Statistik

Dengan indikator sasaran :

- 3.1.1. Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat waktu; dan
- 3.1.2. Jumlah petugas fungsional pranata computer dengan kualifikasi tingkat ahli; dan
- 3.1.3. Jumlah program aplikasi pengolahan untuk kegiatan teknis dan manajemen yang dihasilkan.

3.2. Peningkatan Kualitas komunikasi BPS Pusat dan BPS daerah

Dengan indikator sasaran :

3.2.1. Banyaknya tayangan secara langsung berita resmi statistic data nasional oleh BPS Provinsi; dan

3.2.2. Banyaknya penggunaan video conference untuk rapat teknis BPS Pusat dengan BPS Provinsi.

3.3. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana TIK serta Sarana dan Prasarana Kerja Lainnya

Dengan indikator sasaran :

3.3.1 Persentase sarana dan prasarana TIK dalam kondisi yang baik; dan

3.3.2 Persentase sarana dan prasarana kerja lainnya dalam kondisi yang baik.

3.4. Peningkatan Kuantitas Sarana dan Prasarana TIK serta Sarana dan Prasarana Kerja Lainnya

Dengan indikator sasaran :

3.4.1 Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana TIK yang memadai; dan

3.4.2 Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kerja lainnya yang memadai.

4. Sasaran strategis dari tujuan keempat: "Meningkatkan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan". Adalah :

4.1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Dengan indikator sasaran:

4.1.1. Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu;

4.1.2. Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1;

- 4.1.3. Persentase Pegawai yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai eselon; dan
- 4.1.4. Persentase pegawai BPS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.
- 4.2. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Dengan indikator sasaran:
 - 4.2.1. Jumlah laporan monitoring tindak lanjut hasil audit;
 - 4.2.2. Jumlah fungsional Auditor;
 - 4.2.3. Persentase Satker yang di audit;
 - 4.2.4. Persentase Sakip yang dievaluasi; dan
 - 4.2.5. Laporan Evaluasi hasil Audit
- 4.3. Penataan Kelembagaan dalam Rangka Reformasi Birokrasi dan Mewujudkan Good Governance
Dengan indikator sasaran :
 - 4.3.1. Jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (*Academic Paper*); dan
 - 4.3.2. Penilaian KemenPAN–RB terhadap reformasi birokrasi BPS.
- 4.4. Peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan
Dengan indikator sasaran:
 - 4.4.1. Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK;
 - 4.4.2. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS oleh KemenPAN–RB; dan
 - 4.4.3. Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ke Bappenas.

BAB III

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi dan Arah Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan jangka menengah di bidang data dan informasi statistik adalah peningkatan kualitas statistik nasional. Kualitas data diukur dalam enam dimensi, yaitu akurat, relevan, tepat waktu/*timeliness*, mudah diakses/*accessibility*, koheren/*coherence* yang berarti konsisten antarsektor dan antarperiode dan spasial, serta mudah diinterpretasi/*interpretability*.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut dirumuskan tiga langkah; (1) peningkatan kualitas data, (2) peningkatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan (3) peningkatan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan.

Statistik berkualitas dan dapat diandalkan yang dihasilkan secara tepat waktu merupakan bagian esensial dalam proses perumusan suatu kebijakan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat, meningkatnya kualitas data dan informasi statistik kesejahteraan rakyat, meningkatnya manajemen survei, meningkatnya metodologi survei, meningkatnya dan berkembangnya analisis statistik, meningkatnya hubungan dengan pengguna data meningkatnya efektivitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik, serta meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Peningkatan kualitas data dan informasi statistik selama ini baru terfokus kepada perbaikan metodologi dan teknis statistik. Saat ini perbaikan yang dilakukan diharapkan mulai menyentuh seluruh aspek seperti penelaahan kembali proses ketatalaksanaan (*business process review*), pengembangan kapasitas TIK, dan peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM serta penataan kelembagaan. Keberhasilan upaya peningkatan kualitas data dan informasi

statistik ini tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Keberhasilan peningkatan kualitas data dan informasi statistik juga sangat memerlukan dukungan dan peranan dari SDM. Hal ini menunjukkan meningkatnya kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah.

Pembangunan kapasitas dan penyediaan data dan informasi statistik nasional direncanakan akan dilakukan melalui sebuah program teknis kestatistikan, yaitu program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Program ini akan menjadi sebuah rencana kerja institusi penyedia data dan informasi statistik, baik di pusat maupun daerah.

B. Strategi dan Arah Kebijakan BPS Provinsi Kalimantan Tengah

B.1. Strategi

Peningkatan kualitas data menjadi salah satu sasaran strategis yang akan dicapai BPS Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung strategi dan arah kebijakan nasional di Kalimantan Tengah. Sejalan dengan strategi dan arah kebijakan BPS Provinsi Kalimantan Tengah, selama lima tahun ke depan BPS Provinsi Kalimantan Tengah perlu mengupayakan reformasi dan perubahan terhadap pembangunan statistik secara menyeluruh. Sebagai upaya meningkatkan kualitas data dan meningkatkan kualitas penyajian perlu dilakukan pembenahan-pembenahan, antara lain memenuhi kebutuhan perangkat TIK dan meningkatkan kualitas SDM. Proses peningkatan kualitas data ini, pada gilirannya akan dicerminkan oleh berkurangnya *timelines* penyajian data, dan meningkatkan kualitas penyajian, serta memberikan kemudahan kepada pengguna data untuk mengakses data.

Perkembangan situasi global, perkembangan TIK, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya statistik di masa mendatang

memungkinkan munculnya berbagai tantangan dalam pembangunan statistik di Indonesia. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini dirasakan berdampak terhadap permintaan data dan informasi statistik yang semakin beragam, akurat, berkesinambungan, dan tepat waktu. Permintaan data dan informasi semacam ini tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga datang dari masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif dan efisien, maka program pembangunan statistik diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik terpercaya yang berkualitas. Peningkatan kapasitas kegiatan statistik di BPS Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan untuk menjawab peningkatan permintaan terhadap data dan informasi statistik dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah.

Kapasitas TIK di BPS Provinsi Kalimantan Tengah saat ini juga belum seluruhnya sesuai dengan kemajuan teknologi komputasi yang diperlukan untuk mempercepat pengumpulan, pengolahan, dan diseminasi data yang cakupan maupun kuantitasnya semakin bertambah. Untuk mengimplementasikan Sistem Statistik Nasional dengan memanfaatkan TIK diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.

Sumber daya manusia yang kurang memadai baik kuantitas maupun kualitas merupakan situasi yang agak memprihatinkan pada tingkat BPS Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah. Dengan adanya Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Statistik secara bertahap diharapkan mampu memenuhi kebutuhan SDM.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan data yang berkualitas, pemanfaatan TIK, dan peningkatan kapasitas SDM berdampak kepada kondisi kelembagaan. Oleh karena itu kelembagaan BPS Provinsi Kalimantan Tengah perlu dilakukan penataan kembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan lingkungan strategis.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mengacu pada strategi pembangunan nasional di bidang statistik dalam RPJM Nasional, maka BPS Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan strategi-strategi yang merupakan serangkaian aktivitas utama untuk mencapai sasaran-sasaran proses.

I. Strategi Pencapaian Tujuan Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas

Strategi ini merupakan sarana untuk mencapai apa yang diharapkan dari tujuan pertama. Strategi ini terdiri atas beberapa rangkaian aktivitas utama untuk mencapai sasaran prioritas. Setiap strategi diawali dengan penyusunan Analisis Proses Ketatalaksanaan/*Business Process Analysis* (BPA) dan Rekayasa Ulang Proses Ketatalaksanaan/*Business Process Reengineering* (BPR). Adapun sasaran dan strategi-strategi tersebut diuraikan di bawah ini:

a) Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengaplikasikan Sistem Neraca Nasional Indonesia berdasarkan System of National Account (SNA) 2008 untuk neraca-neraca pokok seperti Neraca Produksi (Production Accounts), Neraca Penerimaan dan Pengeluaran (Generating of Income Accounts), Neraca Kapital (Capital Accounts), dan Neraca Finansial (Financial Accounts) di BPS Pusat dan BPS Daerah sehingga terwujud data neraca nasional yang terbandingkan antarnegara;
2. Memperbaiki ketersediaan data dasar yang diperlukan bagi penerapan SNA 2008, berdasarkan gap analysis (analisis kebutuhan dan ketersediaan);
3. Melakukan koordinasi dengan penyelenggara statistik sektoral guna meningkatkan kualitas data dari instansi sektoral, berdasarkan gap analysis (analisis kebutuhan dan ketersediaan);

4. Memperbaiki sistem pengolahan data untuk SNA 2008;
5. Melakukan perubahan tahun dasar PDB dan PDRB dari tahun 2000 menjadi tahun 2010 agar statistik PDB dan PDRB, serta pertumbuhan sosial dan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan oleh BPS menjadi reliable;
6. Mengubah sistem pengumpulan data Survei Industri Besar/Sedang Tahunan yang semula dilakukan dengan pendekatan sensus menjadi dua pendekatan, untuk Survei Industri Besar melalui pendekatan sensus sedangkan Survei Industri Sedang melalui pendekatan survei sampel;
7. Melaksanakan Sensus Pertanian (ST 2013) yang berkualitas;
8. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas statistik pertanian;
9. Meningkatkan kualitas statistik harga dengan menyelenggarakan Survei Biaya Hidup (SBH) dan menghitung Diagram Timbangan Nilai Tukar Petani pada tahun 2012, serta menyempurnakan sistem pengumpulan, pengolahan, dan penyajian statistik harga;
10. Membangun statistik harga produsen;
11. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi Statistik Ekspor-Impor;
12. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi Statistik Konstruksi;
13. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi Statistik Pertambangan dan Energi;
14. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi Statistik Keuangan;
15. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi Statistik Pariwisata;
16. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi Statistik Teknologi Informasi dan Komunikasi;
17. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi Statistik Perdagangan Dalam Negeri;

- 18.18. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi Statistik Perhubungan;
19. Memperbaiki response rate survei-survei bidang ekonomi; dan
20. Memperbaiki sistem pengolahan data survei berbasis perusahaan maupun rumahtangga.

b) Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Sensus Penduduk 2010 yang berkualitas;
2. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi Statistik Demografi;
3. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data Survei Sosial-Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Nasional (SUSENAS);
4. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS);
5. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data Survei Upah dan Struktur Upah;
6. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi Angka Kemiskinan;
7. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi Statistik Ketahanan Sosial; dan
8. Memperbaiki *response rate* survei-survei bidang sosial.

c) Peningkatan metodologi sensus dan survei

Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperbaiki kerangka sampel bagi survei berbasis rumahtangga maupun perusahaan/usaha;

2. Memperbaiki peta wilayah kerja statistik dan wilayah administrasi (desa/kelurahan) untuk keperluan pengumpulan dan penyajian data dan informasi statistik;
3. Menerapkan desain sensus dan survei yang optimal; dan
4. Memperbaiki metode pengumpulan data dan monitoring/pemantauan.

II. Strategi Pencapaian Tujuan Peningkatan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien

Strategi ini merupakan sarana untuk mencapai apa yang diharapkan dari tujuan kedua. Rangkaian aktivitas dari sasaran strategis ini adalah :

a) Peningkatan dan pengembangan analisis statistik

Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas statistik lintas sektor
2. Meningkatkan konsistensi statistik lintas sektor;
3. Membangun Sistem Manajemen Kualitas Total; dan
4. Menyempurnakan klasifikasi dan standarisasi statistik untuk keperluan pengumpulan, penyajian, dan analisis statistik.

b) Peningkatan efektivitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik

Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperbaiki kemudahan akses terhadap data BPS Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Memperbaiki kualitas layanan dan hasil-hasil (data dan informasi statistik); dan
3. Meningkatkan penggunaan SiRusa, kompilasi metadata dalam kerangka Sistem Rujukan Statistik.

c) Peningkatan hubungan dengan pengguna data

Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperbaiki kepuasan pelanggan;
2. Memperbaiki kemitraan dengan penyedia data; dan
3. Memperbaiki komunikasi dengan pengguna dan penyedia data.

III. Strategi Pencapaian Tujuan Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja

Untuk mencapai apa yang diharapkan dari misi kedua BPS Provinsi Kalimantan Tengah yaitu menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia, maka dirumuskan strategi bidang teknologi informasi dan komunikasi. Strategi ini diarahkan untuk mencapai sasaran strategis dalam rangka perkuatan sistem basis data. Adapun tujuan strategi ini adalah untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi mutakhir.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, BPS Provinsi Kalimantan Tengah merumuskan beberapa strategi pembangunan arsitektur dan kerangka kerja teknologi informasi komunikasi dan manajemen informasi melalui serangkaian aktivitas utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

a) Peningkatan kualitas pengolahan data dan informasi statistik

Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan komunikasi data; dan
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

b) Peningkatan kualitas komunikasi BPS Pusat dengan BPS Daerah

Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan BPS Daerah.

c) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana TIK serta sarana dan prasarana kerja lainnya

Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK secara umum; dan
2. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja.

d) Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana TIK serta sarana dan prasarana kerja lainnya

Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membangun standardisasi TIK (TIK arsitektur, prosedur, perangkat keras dan perangkat lunak);
2. Membangun dan merenovasi gedung kantor yang memadai sesuai dengan kebutuhan organisasi dan jumlah SDM;
3. Membangun dan merenovasi rumah dinas yang layak huni sesuai kebutuhan organisasi; dan
4. Mencukupi kebutuhan kendaraan operasional lapangan dalam rangka mempercepat proses kegiatan statistik.

IV. Strategi Pencapaian Tujuan Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan

Strategi ini merupakan sarana untuk mencapai apa yang diharapkan dari misi BPS Provinsi Kalimantan Tengah yang kesatu, kedua dan kelima. Misi kesatu BPS Provinsi Kalimantan Tengah yaitu memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien. Misi kedua BPS Provinsi Kalimantan Tengah yaitu menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia. Misi kelima BPS Provinsi Kalimantan Tengah yaitu meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan

pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien. Strategi ini diarahkan untuk mencapai sasaran strategis dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan. Adapun tujuan strategi ini adalah untuk meningkatkan kinerja aparatur BPS Provinsi Kalimantan Tengah.

Keberhasilan peningkatan kualitas data dan informasi statistik juga sangat memerlukan dukungan dan peranan dari SDM serta pengelolaan kelembagaan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, pembangunan SDM dan penataan kelembagaan merupakan bagian strategis dalam pembangunan statistik nasional lima tahun ke depan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, BPS Provinsi Kalimantan Tengah merumuskan beberapa strategi untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia dan penataan kelembagaan, yang terdiri atas serangkaian aktivitas utama untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan.

a) Memperbaiki sumber daya manusia

Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membuat Analisis Proses Ketatalaksanaan dan Rekayasa Ulang Proses Ketatalaksanaan untuk kondisi sumber daya manusia BPS Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Melakukan analisis kesenjangan (*gap analysis*) antara kondisi saat ini dan kebutuhan di masa yang akan datang;
3. Memperbaiki perilaku individu dalam bekerja (*code of conduct*) untuk setiap aparatur BPS Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggara administrasi kepegawaian;
5. Membangun kebijakan dan prosedur pengembangan sumber daya manusia;

6. Memperbaiki penerimaan dan penempatan sumber daya manusia pada semua level;
7. Membangun perencanaan karir;
8. Membangun sistem informasi sumber daya manusia untuk mendukung implementasi kebijakan SDM;
9. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggara protokoler, hukum, dan kehumasan;

b) Penataan kelembagaan dalam rangka reformasi birokrasi dan mewujudkan *good governance*

Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antarunit di BPS Provinsi Kalimantan Tengah dan antara BPS Kabupaten/Kota, serta dengan instansi terkait dalam rangka terwujudnya perencanaan kegiatan BPS yang berkualitas;
2. Membuat Analisis Proses Ketatalaksanaan dan Rekayasa Ulang Proses Ketatalaksanaan kelembagaan BPS;
3. Melakukan reorganisasi berdasarkan kondisi lingkungan kerja di masa yang akan datang;
4. Menyesuaikan dan memperbaiki kerangka hukum dan peraturan untuk mendukung administrasi kegiatan statistik;
5. Mengembangkan dan mengimplementasikan budaya kerja BPS Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Membangun Sistem Perencanaan Sumber Daya Terpadu;
7. Membangun sistem manajemen dokumen; dan
8. Memperbaiki proses pengambilan keputusan strategis dan peningkatan proses arus informasi untuk mendukung pengambilan keputusan.

c) Peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

1. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggara administrasi keuangan; dan
2. Melaksanakan perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi program dan kegiatan BPS secara efektif.

d) Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Provinsi Kalimantan Tengah

1. Membangun peraturan pengawasan dan pemeriksaan internal BPS Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kegiatan-kegiatan BPS Provinsi Kalimantan Tengah secara intensif;
3. Meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh satuan kerja BPS Provinsi Kalimantan Tengah; dan
4. Membangun sistem pengawasan dan pemeriksaan yang baru, efektif dan efisien.

B.2. Arah Kebijakan

Sebagai tindak lanjut Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang sudah ditetapkan, BPS Provinsi Kalimantan Tengah menentukan arah kebijakan Pembangunan Statistik Nasional sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan statistik dasar dengan cara sensus, survei dan kompilasi administrasi sesuai dengan yang tercantum pada pasal 11 UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Sensus yang termaktub pada pasal tersebut adalah Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, dan Sensus Ekonomi yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali. Penyelenggaraan Sensus merupakan prioritas nasional dalam menyediakan statistik dasar terkait demografi dan kependudukan, sektor pertanian dan sektor ekonomi sebagai landasan pengambilan keputusan atau landasan penyusunan kebijakan pemerintah.

- b. Melakukan reviu terhadap UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik berikut peraturan perundangan pelaksanaannya. UU No. 16 tahun 1997 perlu ditinjau kembali, terutama terkait struktur organisasi BPS di pusat dan daerah, penegasan peran BPS dalam koordinasi dengan penyelenggara kegiatan statistik sektoral dalam kerangka penyusunan statistik sektoral yang andal dan efektif dan pemanfaatan produk administrasi instansi sebagai sumber penyusunan statistik dasar. Koordinasi dengan instansi sektoral seharusnya seiring dengan amanat PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Implementasi pelaksanaan PP No. 41 tahun 2007 tentang rumpun kegiatan perangkat daerah juga perlu ditindaklanjuti dengan asas vertikalitas BPS daerah agar terhindar kesimpangsiuran interpretasi dan implementasi PP No. 38 Tahun 2007.
- c. Memelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan prima dengan berlandaskan kepada asas keterpaduan, keakurasian, dan pemutakhiran. Keterpaduan mempunyai makna bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan. Prinsip keakurasian mengandung makna bahwa semua kegiatan statistik harus diupayakan untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang seksama, cermat, tepat, dan benar. Sedangkan kemutakhiran berarti bahwa data dan informasi statistik yang disajikan atau yang tersedia harus dapat menggambarkan fenomena atau perubahannya menurut keadaan yang terkini. Oleh karena itu, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta diseminasi data dan informasi statistik harus senantiasa diupayakan secara terus menerus, berkesinambungan, dan runtun waktu.
- d. Mewujudkan kondisi yang mendukung penerapan atas Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). NSPK akan mempermudah pengguna

dalam menganalisis data dan informasi statistik dan dapat melakukan perbandingan antara data yang satu dengan lainnya, baik perbandingan dalam skala regional, nasional, maupun internasional.

- e. Memfasilitasi peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, khususnya ilmu statistik, melalui penelitian-penelitian maupun studi. Penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan ini terutama ditujukan untuk mencapai penyelenggaraan kegiatan statistik yang lebih efektif dengan kualitas hasil yang mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap data dan informasi statistik yang disajikan.
- f. Mengupayakan terwujudnya sistem informasi statistik yang andal dan efisien dengan memanfaatkan teknologi mutakhir yang tepat guna dan berhasil guna. Hasil kegiatan statistik akan sia-sia bila tidak dimanfaatkan para pengguna. Sistem informasi statistik merupakan sarana untuk menyebarluaskan hasil kegiatan statistik, baik kepada pemerintah maupun masyarakat luas.
- g. Mengupayakan pembinaan dalam pengembangan sistem informasi statistik terhadap seluruh penyelenggara kegiatan statistik nasional. Penguasaan teknologi informasi masih belum merata pada penyelenggara kegiatan statistik. Kesetaraan pengetahuan tentang teknologi informasi akan menunjang pengembangan Sistem Statistik Nasional yang terpadu.
- h. Memelopori peningkatan kemampuan para pelaksana kegiatan statistik dalam menyelenggarakan dan menyajikan data dan informasi statistik. Kualitas SDM pelaksana kegiatan statistik sangat berpengaruh terhadap kualitas data dan informasi statistik yang dihasilkan dan disajikan. Tingginya kualitas SDM pelaksana akan menghasilkan data dan informasi statistik yang bermutu tinggi.
- i. Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting dan kegunaan statistik. Selain tergantung kepada kualitas pelaksana, mutu data dan informasi statistik juga dipengaruhi oleh sumber data.

Masyarakat sebagai sumber data akan ikut menentukan kualitas data yang dihasilkan, mengingat data yang diperoleh sangat tergantung kepada mutu jawaban yang diberikan masyarakat sebagai sumber data.

- j. Mengupayakan pembinaan untuk pendayagunaan satuan kerja bidang statistik di semua lembaga pemerintah maupun swasta. Satuan kerja bidang statistik di berbagai lembaga tersebut belum mempunyai pengetahuan yang merata di bidang statistik, penyetaraan pengetahuan tentang statistik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan statistik. Salah satu upaya BPS mencakup fasilitasi terhadap tenaga-tenaga fungsional statistisi maupun pranata komputer pada instansi-instansi sektoral, baik di tingkat instansi pusat maupun perangkat daerah.
- k. Mengupayakan penyediaan kelengkapan peralatan teknologi informasi seperti *notebook/laptop* untuk petugas Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dalam rangka pengembangan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui sistem elektronik survei.

C. Program dan Kegiatan

Sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, BPS mempunyai satu Program Teknis dan dua Program Generik. Program Teknis BPS adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Adapun Program Generik BPS meliputi: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS dan (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS.

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS) bertujuan untuk menyediakan dan memberi pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik, BPS secara berkesinambungan

menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, peningkatan kapasitas SDM, dan fungsi kehumasan.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah.

Setiap program dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit Esselon II di BPS Pusat. Program Teknis BPS Provinsi adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS), yang merupakan dekonsentrasi kegiatan dari masing-masing Eselon II di BPS (pusat). Sedangkan untuk Program Generik, pada setiap Satuan Kerja Esselon II BPS Provinsi disediakan dua program, yaitu: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi, dan (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS Provinsi. Demikian pula bagi BPS Kabupaten/Kota disediakan Program Teknis dan Program Generik yang sama dengan BPS Provinsi.

Dari 26 Kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit Eselon II BPS Pusat, ditentukan enam prioritas kegiatan. Penentuan prioritas didasarkan kepada :

- (i) Amanat UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yakni penyelenggaraan Sensus, meliputi Sensus Penduduk 2010, Sensus Pertanian 2013 dan persiapan Sensus Sosial dan Kesejahteraan Rakyat 2016.
- (ii) Penyediaan data strategis yang mendukung Visi dan Misi RPJM Nasional, meliputi kegiatan statistik berskala besar dan lintas sektor: Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Nasional dan Regional, Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga, Penyediaan dan Pengembangan Statistik Rumahtangga melalui Survei Sosial Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Nasional (SUSENAS) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Penyediaan dan Pengembangan Data Kemiskinan, Penyediaan dan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Industri Besar/Sedang, Survei Biaya Hidup dan Survei Diagram Timbangan Nilai Tukar Petani 2012, serta Sensus Potensi Desa 2013.

Dalam perkembangannya di tahun 2012 ini dan seterusnya, penyelenggaraan sensus BPS telah ditetapkan sebagai Kegiatan Prioritas Nasional. Sedangkan kegiatan survei BPS lainnya tetap merupakan prioritas Kementerian/Lembaga.

Secara lengkap Secara lengkap hubungan Visi, Misi, hingga Program dan Kegiatan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2014 disajikan pada Tabel 2. Tabel 3 menyajikan indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan fokus prioritas dengan target pencapaiannya pada 2010 dan 2014, untuk Tabel 4 menyajikan alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam rangka mencapai sasaran dan capaian program selama 2010-2014.

Tabel 2. Hubungan, Visi, Misi, hingga Program dan Kegiatan BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2014

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelopor Data Statistik terpercaya untuk semua	1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien; 2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia; 3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap	1. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas; 1.a. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS	1.1. Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu Dengan indikator sasaran: 1.1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik ekonomi makro; 1.1.2. Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik ekonomi makro; dan 1.1.3. Persentase publikasi statistik ekonomi makro yang rilis sesuai jadwal; 1.2. Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat	a. Menyelenggarakan statistik dasar dengan cara sensus survei dan kompilasi administrasi sesuai dengan yang tercantum pada UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik pasal 11. b. Melakukan reviu terhadap UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik berikut peraturan perundangan pelaksanaannya, terutama terkait struktur organisasi BPS di pusat dan di daerah. c. Memelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan prima dengan berlandaskan kepada asas keterpaduan, keakurasian, dan pemutakhiran d. Mewujudkan kondisi yang mendukung penerapan atas Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) e. Memfasilitasi peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, khususnya ilmu statistik, melalui penelitian penelitian maupun studi f. Mengupayakan terwujudnya system informasi statistik yang andal dan efisien dengan memanfaatkan teknologi mutakhir yang tepat guna dan berhasil guna g. Mengupayakan pembinaan dalam pengembangan system informasi statistik	1. Teknis PPIS 2. Generik DMPTTL PSPA	Kegiatan Prioritas dalam program PPIS: Kegiatan : Penyediaan dan Pengembangan statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan perkebunan Fokus Kegiatan : Sensus Pertanian 2013 (ST2013) Kegiatan : Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga Fokus Kegiatan : Survei Biaya Hidup (SBH 2012) Penyempurnaan Diagram Timbangan NTP (Nilai Tukar Petani) 2012 Kegiatan : Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri Fokus Kegiatan : Persiapan Sensus Ekonomi Kegiatan : Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<p>penyelenggara statistik;</p> <p>4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak; dan</p> <p>5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka SSN yang efektif dan efisien</p>		<p>dan tepat waktu</p> <p>Dengan indikator sasaran:</p> <p>1.2.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat;</p> <p>1.2.2. Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat; dan</p> <p>1.2.3. Persentase publikasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang rilis sesuai jadwal.</p> <p>1.3. Meningkatkan metodologi sensus dan survei, serta memasukan dokumen</p> <p>Dengan indikator sasaran :</p>	<p>terhadap seluruh penyelenggara kegiatan statistik nasional</p> <p>h. Memelopori peningkatan kemampuan para palaksana kegiatan statistik dalam menyelenggarakan dan menyajikan data dan informasi statistic</p> <p>i. Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting dan kegunaan statistic</p> <p>j. Mengupayakan pembinaan untuk pendayagunaan satuan kerja bidang statistik di semua lembaga pemerintah maupun swasta</p> <p>k. Mengupayakan penyediaan kelengkapan peralatan teknologi informasi seperti <i>notebook/laptop</i> untuk petugas Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dalam rangka pengembangan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui system elektronik survei</p>		<p>Fokus Kegiatan : Penyusunan Statistik Neraca Regional</p> <p>Kegiatan : Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan Dan Ketenagakerjaan</p> <p>Fokus Kegiatan : Sensus Penduduk (SP) 2010 Persiapan Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2015 Survei Angkatan Kerja Nasional</p> <p>Kegiatan : Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Fokus Kegiatan : Survei Sosial Ekonomi Nasional</p> <p>Kegiatan : Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan</p>

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<p>2. Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien;</p> <p>2.a. Persentase konsumen yang merasa puas dengan layanan data BPS</p>	<p>1.3.1. Persentase peta wilayah administrasi dan blok sensus yang mutakhir;</p> <p>1.3.2. Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data; dan</p> <p>1.3.3. Persentase Pemasukan dokumen/<i>response rate</i> dari kegiatan survei statistik.</p> <p>2.1. Meningkatkan dan Mengembangkan analisis statistik Dengan indikator sasaran :</p> <p>2.1.1. Jumlah studi konsistensi data sosial dan data ekonomi;</p> <p>2.1.2. Jumlah judul publikasi statistik yang mempunyai ISSN/ISBN;</p> <p>2.1.3. Jumlah fungsional statistisi dengan kualifikasi tingkat ahli; dan</p>			<p>Sosial</p> <p>Fokus Kegiatan : Pendataan Potensi Desa (Podes) Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)</p> <p>DMPTTL II:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Penyusunan, Pengembangan dan Evaluasi Program Kegiatan dan Anggaran ☐ Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan Masyarakat, dan Hukum ☐ Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara ☐ Pelayanan Internal Perkantoran dan Kepegawaian ☐ Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) ☐ Operasional Perkantoran lainnya (Kegiatan Lintas Biro) ☐ Biro Umum (di luar PSPA Pusat)

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<p>2.2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik Dengan indikator sasaran :</p> <p>2.2.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS;</p> <p>2.2.2. Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS;</p> <p>2.2.3. Jumlah pengunjung yang datang ke pelayanan Statistik Terpadu; dan</p> <p>2.2.4. Jumlah publikasi elektronik yang diupload.</p> <p>2.3. Meningkatkan hubungan dengan pengguna data Dengan indikator sasaran:</p> <p>2.3.1. Persentase konsumen data</p>			<p>□ Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi</p> <p>□ Dukungan Manajemen dan Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian</p> <p>□ Pelayanan Publik, Hubungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Kabupaten/Kota</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS:</p> <p>□ Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Pusat</p> <p>□ Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi dan BPS Kab/Kota</p> <p>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Aparatur BPS (P2A2):</p> <p>□ Pengawasan dan Peningkatan</p>

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<p>3. Penguatan teknologi informasi dan komunikasi serta sarana kerja;</p> <p>3.a. Jumlah Satker yang mempunyai situs web yang terhubung secara online</p>	<p>yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya;</p> <p>2.3.2. Banyaknya kunjungan tamu dari dalam dan luar negeri; dan</p> <p>2.3.3. Jumlah Pengunjung berulang yang Menggunakan data BPS.</p> <p>3.1. Meningkatnya Kualitas Pengolahan Data dan Informasi Statistik</p> <p>Dengan indikator sasaran :</p> <p>3.1.1. Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat waktu;</p> <p>3.1.2. Jumlah petugas fungsional pranata komputer dengan klasifikasi tingkat ahli; dan</p> <p>3.1.3 Jumlah program aplikasi pengolahan untuk kegiatan teknis</p>			<p>Akuntabilitas Inspektorat I</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II ▣ Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<p>dan manajemen yang dihasilkan.</p> <p>3.2. Peningkatan Kualitas Komunikasi BPS Pusat dengan BPS Daerah Dengan indikator sasaran :</p> <p>3.2.1. Banyaknya tayangan secara langsung Berita Resmi Statistik data nasional oleh BPS Provinsi; dan</p> <p>3.2.2. Banyaknya penggunaan <i>Video Conference</i> untuk rapat teknis BPS Pusat dengan BPS Daerah.</p> <p>3.3. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana TIK serta Sarana dan Prasarana Kerja Lainnya Indikator sasaran :</p> <p>3.3.1. Persentase sarana dan prasarana TIK dalam kondisi</p>			

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		4. Peningkatan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan; 4.a. Persentase	yang baik; dan 3.3.2.Persentase sarana dan prasarana kerja lainnya dalam kondisi yang baik 3.4. Peningkatan Kuantitas Sarana dan Prasarana TIK serta Sarana dan Prasarana Kerja Lainnya Dengan indikator sasaran : 3.4.1.Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana TIK yang memadai; dan 3.4.2.Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kerja lainnya yang memadai. 4.1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Dengan indikator sasaran :			

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1	<p>4.1.1. Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu</p> <p>4.1.2. Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1;</p> <p>4.1.3. Persentase pejabat yang sudah pernah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon; dan</p> <p>4.1.4. Persentase pegawai BPS yang telah Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.</p> <p>4.2. Meningkatkan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS</p> <p>Indikator Sasaran:</p> <p>4.2.1. Jumlah laporan monitoring tindak lanjut hasil audit;</p>			

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			4.2.2.Jumlah fungsional Auditor; 4.2.3.Persentase Satker yang di audit; 4.2.4.Persentase SAKIP yang dievaluasi; dan 4.2.5 laporan Evaluasi hasil audit 4.3. Penataan Kelembagaan dalam Rangka Reformasi Birokrasi dan Mewujudkan Good Governance Dengan indikator sasaran : 4.3.1.Jumlah peraturan perundangundangan yang diselesaikan (Academic Paper); dan 4.3.2.Penilaian KemenPAN–RB terhadap reformasi birokrasi BPS. 4.4. Peningkatan Akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan Kegiatan Dengan indikator			

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			sasaran : 4.4.1.Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK; 4.4.2.Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (R-B); dan 4.4.3.Laporan triwulanan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ke Bappenas.			

Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas BPS 2010-2014

No	Kegiatan/Fokus Kegiatan	Output	Indikator Kinerja	Target				
				2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	<p><u>Kegiatan :</u> Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan Dan Ketenagakerjaan</p> <p><u>Fokus Kegiatan :</u> Sensus Penduduk (SP) 2010</p> <p>Persiapan Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2015</p> <p>Survei Angkatan Kerja Nasional</p>	<p>Publikasi hasil SP 2010</p> <p>Laporan Persiapan Supas 2015</p> <p>Publikasi hasil Sakernas</p>	<p>1. Jumlah judul Publikasi dan Laporan Hasil SP 2010</p> <p>1. Jumlah Laporan Persiapan Supas 2015</p> <p>1. Jumlah judul Publikasi Hasil Sakernas 2. <i>Response rate</i> Sakernas</p>	-	1	-	-	-
				-	-	-	-	1
				1	1	1	1	1
				100 %	100%	100%	100%	100%
2	<p><u>Kegiatan :</u> Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat</p> <p><u>Fokus Kegiatan :</u> Survei Sosial Ekonomi Nasional</p>	<p>Publikasi hasil Susenas</p>	<p>1. Jumlah judul Publikasi Hasil Susenas</p>	2	2	2	2	2

No	Kegiatan/Fokus Kegiatan	Output	Indikator Kinerja	Target				
				2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			2. <i>Response rate</i> Susenas	100 %	100%	100%	100%	100%
3	<u>Kegiatan :</u> Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial <u>Fokus Kegiatan :</u> Pendataan Potensi Desa (Podes) Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)	Publikasi Hasil Podes <i>File</i> Daftar Rumah Tangga Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan	1. Jumlah Publikasi Podes 1. <i>File</i> Daftar Rumah Tangga Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan	-	-	-	-	-
4	<u>Kegiatan :</u> Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi <u>Fokus Kegiatan :</u> Penyusunan Statistik Neraca Regional	Publikasi Hasil Penyusunan Statistik Neraca Regional (PDRB)	1. Jumlah judul Publikasi Hasil Penyusunan Statistik Neraca Regional (PDRB)	1	1	1	1	1
5	<u>Kegiatan :</u> Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi							

No	Kegiatan/Fokus Kegiatan	Output	Indikator Kinerja	Target				
				2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<u>Fokus Kegiatan :</u> Persiapan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016)	Laporan Persiapan SE2016	1. Jumlah Laporan Persiapan SE2016	-	-	-	-	1
6	<u>Kegiatan :</u> Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga <u>Fokus Kegiatan :</u> Survei Biaya Hidup (SBH 2012) Penyempurnaan Diagram Timbangan NTP (Nilai Tukar Petani) 2012	Publikasi hasil SBH 2012 Publikasi Diagram Timbangan NTP 2012	1. Jumlah judul Publikasi dan Laporan Hasil SBH 2012 2. <i>Response rate</i> SBH 2012 1. Jumlah judul Publikasi dan Laporan Hasil Penyempurnaan NTP 2012 2. <i>Response rate</i> NTP 2012	- - - -	- - - -	- 100% - 100%	- - 1 -	- - - -
7	<u>Kegiatan :</u> Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan <u>Fokus Kegiatan :</u> Sensus Pertanian 2013 (ST2013)	Publikasi Hasil ST2013	1. Jumlah judul Publikasi dan Laporan Hasil ST2013	-	-	-	2	2

Tabel 4. Alokasi Anggaran 2010-2014 Menurut Program**(Rupiah)**

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI		
	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
A. ALOKASI PROGRAM TEKNIS	13.490.673.000	27.380.679.000	19.461.768.000
I. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS)	13.490.673.000	27.380.679.000	19.461.768.000
BPS Provinsi Kalimantan Tengah	4.911.881.000	6.416.769.000	10.065.913.000
BPS Kabupaten/Kota	8.578.792.000	20.963.910.000	9.395.855.000
B. ALOKASI PROGRAM GENERIK	27.506.185.000	26.737.227.000	39.415.836.000
I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	18.839.185.000	20.534.576.000	35.525.220.000
BPS Provinsi Kalimantan Tengah	3.809.641.000	4.683.738.000	7.928.423.000
BPS Kabupaten/Kota	15.029.544.000	15.850.838.000	27.596.797.000
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS	8.667.000.000	6.202.651.000	3.890.616.000
BPS Provinsi Kalimantan Tengah	8.400.000.000	-	1.534.000.000
BPS Kabupaten/Kota	267.000.000	6.202.651.000	2.356.616.000
TOTAL	40.996.858.000	54.117.906.000	58.877.604.000

Catatan:

- *) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS belum termasuk rencana anggaran/dana remunerasi kecuali tahun 2014

BAB IV

PENUTUP

Mengingat pentingnya peranan data dan informasi statistik dalam proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan nasional maupun bagi masyarakat, maka BPS Provinsi Kalimantan Tengah menentukan strategi-strategi perkuatan data dan informasi statistik sehingga menjadi sumber informasi pembangunan yang dapat dipercaya oleh semua pihak. Hal ini sejalan dengan RPJMN 2010-2014, yang menempatkan pembangunan data dan informasi statistik sebagai program pendukung manajemen pembangunan nasional di Provinsi Kalimantan Tengah.

Perkuatan data dan informasi statistik dilakukan dengan menata ulang kelembagaan dalam kerangka pencapaian *good governance* dan *clean government*. Reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkat kualitas data, dengan membangun pilar-pilar pendukung yang meliputi pembangunan arsitektur dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung TIK, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM. Komitmen ini dirumuskan sebagai antisipasi menghadapi tantangan global maupun regional pada periode lima tahun ke depan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

lampiran 1.

Target Pembangunan Tahun 2010-2014 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	Satuan	TARGET		
					2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)		(7)	(8)	(9)
1.	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)						
	1. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas	1.A. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas	1.A.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS		85 %	85 %	85 %
	1.1. Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat, dan tepat waktu	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas	1.1.1 Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik ekonomi makro		85 %	85 %	85 %
			1.1.2 Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik ekonomi makro		85 %	85 %	87 %
			1.1.3 Persentase publikasi statistik ekonomi makro yang rilis sesuai jadwal		80 %	82 %	85 %
	1.2. Tersedianya data dan informasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu	Tersedianya data dan informasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu	1.2.1 Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat		87 %	89 %	90 %

No	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	Satuan	TARGET		
					2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)		(7)	(8)	(9)
			1.2.2 Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat		87 %	89 %	90 %
			1.2.3 Jumlah publikasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang rilis sesuai jadwal		5	4	4
	1.3. Mengembangkan metodologi sensus dan survei, serta pemasukan dokumen	Tersedianya metodologi Sensus dan Survei yang mutakhir	1.3.1 Persentase peta wilayah administrasi dan blok sensus yang mutakhir		100 %	100 %	100 %
			1.3.2 Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data		100 %	100 %	100 %
			1.3.3 Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan survei statistik		100 %	100 %	100 %
	2. Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien	2.A. Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien	2.A.1. Presentase konsumen yang merasa puas dengan layanan data BPS		92 %	94 %	96 %
	2.1. Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik	Meningkatnya dan berkembangnya analisis statistik	2.1.1 Jumlah studi konsistensi data sosial dan data ekonomi		-	-	-

No	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	Satuan	TARGET		
					2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	
			2.1.2 Jumlah judul publikasi indikator dan analisis statistik		2	3	3
			2.1.3 Jumlah fungsional statistisi dengan kualifikasi tingkat ahli		2	2	6
	2.2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik	2.2.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS		1500	1500	1574
			2.2.2. Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS		36	36	38
			2.2.3. Jumlah pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu		1020	1020	1100
			2.2.4. Jumlah Publikasi Elektronik yang diupload di Website BPS		26	26	26
	3. Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja	3.A. Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja	3.A.1. Jumlah Satker yang mempunyai situs web yang terhubung secara online		15	15	15

No	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	Satuan	TARGET		
					2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)		(7)	(8)	(9)
	3.1. Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik	Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik	3.1.1. Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat waktu		100 %	100 %	100 %
			3.1.2. Jumlah program aplikasi pengolahan untuk kegiatan teknis dan manajemen yang dihasilkan		-	-	-
			3.1.3. Jumlah program aplikasi pengolahan untuk kegiatan teknis dan manajemen yang dihasilkan		-	-	-
	A. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	A.1. Dokumen Hasil Pemutakhiran Metodologi Sensus dan Survei yang tepat guna	A.1.a. Persentase dokumen desain sampling untuk sensus dan survei yang tepat guna		100%	100%	100%
			A.1.b. Persentase BPS Kabupaten/Kota yang mempunyai kerangka sampel yang mutakhir		100%	100%	100%
			A.1.c. Persentase peta wilayah administrasi dan blok sensus yang mutakhir		100%	100%	100%
			A.1.d. Persentase sampel terpilih yang mewakili		100%	100%	100%

No	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	Satuan	TARGET		
					2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)		(7)	(8)	(9)
	B. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	B.1. Layanan Terhadap Pengguna Data	B.1.a. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui Website BPS		1500	1500	1574
			B.1.b. Jumlah pengunjung yang datang ke Pelayanan Statistik Terpadu		1020	1020	1100
			B.1.c. Jumlah transaksi pembelian/ permintaan data mentah oleh pihak luar		-	80	80
			B.1.e. Terselenggaranya pelayanan terhadap pengguna data yang sesuai SOP		100%	100%	100%
			B.1.f. Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data		85%	85%	85%
			B.1.g. Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data		85%	85%	87%
			B.1.h. Persentase konsumen yang merasa puas terhadap layanan data BPS		85%	85%	85%
			C. Pengembangan Sistem Informasi Statistik	C.1. Pelayanan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	C.1.a. Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat waktu		100%

No	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	Satuan	TARGET		
					2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)		(7)	(8)	(9)
			C.1.b. Jumlah tenaga fungsional pranata komputer dengan klasifikasi tingkat ahli		1	1	1
			C.1.c. Jumlah program aplikasi pengolahan untuk kegiatan statistik dan manajemen yang dihasilkan		-	-	-
			C1.d Terselenggaranya pelayanan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sesuai SOP		100%	100%	100%
	D.Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	D.1. Publikasi Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	D.1.a Persentase penyajian/release data dan informasi Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan tiap semester		100%	100%	100%
			D.1.b Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan		100%	100%	100%

No	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	Satuan	TARGET		
					2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)		(7)	(8)	(9)
			D.1.c Jumlah judul Publikasi Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang mempunyai ISSN/ISBN		2	2	2
	D.A.Sensus Penduduk (SP) 2009	D.A.1. Publikasi Sensus Penduduk 2010	D.A.1.a Jumlah judul Publikasi dan Laporan Hasil SP 2010		-	-	-
	D.B. Persiapan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2014	D.B.1. Publikasi Survei Antar Sensus	D.B.1.a. Jumlah Laporan Persiapan Supas 2015		-	-	1
	D.C.Survei Angkatan Kerja Nasional	D.C.1. Publikasi Survei Angkatan Kerja Nasional	D.C.1.a. Jumlah judul Publikasi Hasil Sakernas		2	2	2
			D.C.1.b.Response rate Sakernas		100%	100%	100%
	E. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	E.1. Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat	E.1.a Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan Statistik Kesejahteraan Rakyat		100%	100%	100%
			E.1.b Jumlah judul Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat yang mempunyai ISSN/ISBN		2	2	2
	E.A.Survei Sosial Ekonomi Nasional	E.A.1. Publikasi Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional	E.A.1.a. Jumlah judul Publikasi Hasil Susenas		2	2	2

No	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	Satuan	TARGET		
					2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)		(7)	(8)	(9)
			E.A.1.b. Response rate Susenas		100%	100%	100%
	F. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	F.1. Publikasi Statistik Ketahanan Sosial	F.1.a Persentase penyajian/release data dan informasi Statistik Ketahanan Sosial setiap tahun		100%	100%	100%
			F.1.b Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan Statistik Ketahanan Sosia		100%	100%	100%
			F.1.c Jumlah judul Publikasi Statistik Ketahanan Sosial yang mempunyai ISSN/ISBN		1	1	1
	F.A.Pendataan Potensi Desa (Podes)	F.A.1. Publikasi Pendataan Potensi Desa	F.A.1.a. Jumlah Publikasi Podes		-	-	1
	F.B.Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)	F.B.1. File Daftar Rumah Tangga Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan	F.B.1.a File Daftar Rumah Tangga Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan		-	-	-
	G. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan	G.1. Publikasi Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	G.1.a Persentase penyajian/ release data dan informasi Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan hari kerja pertama setiap		100%	100%	100%

No	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	Satuan	TARGET		
					2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)		(7)	(8)	(9)
			kuartalan				
			G.1.b Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan		100%	100%	100%
			G.1.c Jumlah judul Publikasi Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang mempunyai ISSN/ISBN		2	2	2
	G.A.Sensus Pertanian 2013 (ST2013)	G.A.1. Publikasi dan Laporan Pelaksanaan Sensus Pertanian 2013	G.A.1.a. Jumlah judul Publikasi dan Laporan Hasil ST2013		-	-	1
	H. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	H.1. Publikasi Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	H.1.a Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan statistik		100%	100%	100%
			H.1.b Jumlah judul Publikasi Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang mempunyai ISSN/ISBN		-	-	-
	I. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri,	I.1. Publikasi Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi,	I.1.a Persentase penyajian/release data dan informasi Statistik Industri		100%	100%	100%

No	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	Satuan	TARGET		
					2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)		(7)	(8)	(9)
	Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan konstruksi	dan Konstruksi	pada hari kerja pertama setiap triwulan				
			I.1.b Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi		100%	100%	100%
			I.1.c Jumlah Judul Publikasi Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi yang mempunyai ISSN/ISBN		1	1	1
	J. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi	J.1. Publikasi Statistik Distribusi	J.1.a Persentase penyajian/release data dan informasi Statistik Distribusi pada hari kerja pertama setiap bulan		100%	100%	100%
			J.1.b Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan Statistik perdagangan Dalam Negeri dan Transportasi		100%	100%	100%
	J.A. Persiapan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016)	J.A.1. Laporan Persiapan SE2016	J.A.1.a. Jumlah Laporan Persiapan SE2016		-	-	-

No	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	Satuan	TARGET		
					2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)		(7)	(8)	(9)
	K. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga	K.1. Publikasi Statistik Harga	K1.a Persentase penyajian/release data dan informasi Statistik Harga pada hari kerja pertama setiap bulan		100%	100%	100%
			K1.b Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan Statistik Harga		100%	100%	100%
	K.A.Survei Biaya Hidup (SBH 2012)	K.A.1. Publikasi Survei Biaya Hidup	K.A.1.a. Jumlah judul Publikasi dan Laporan Hasil SBH 2012		100%	-	-
			K.A.1.b. Response rate SBH 2012		100%	-	-
	K.B.Penyempurnaan Diagram Timbangan NTP (Nilai Tukar Petani) 2011	K.B.1. Publikasi penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani	K.B.1.a. Jumlah judul Publikasi dan Laporan Hasil Penyempurnaan NTP 2012		-	1	-
			K.B.1.b. Response rate NTP 2012		100%	-	-
	L. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	L.1. Publikasi Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	L.1.a Persentase penyajian/release data dan informasi Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata pada hari kerja pertama setiap bulan		100%	100%	100%

No	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	Satuan	TARGET		
					2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)		(7)	(8)	(9)
			L.1.b Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata		100%	100%	100%
			L.1.c Jumlah judul Publikasi Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang mempunyai ISSN/ISBN		1	1	1
	M. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi	M.1. Publikasi Statistik Neraca Produksi	M.1.a Persentase Penyajian/release data dan informasi Neraca Produksi hari kerja ke 5 pada bulan kedua setelah triwulan berakhir		100%	100%	100%
			M.1.b Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan Statistik Neraca Produksi		100%	100%	100%
	M.A.Penyusunan Statistik Pendapatan Nasional	M.A.1.Publikasi Pendapatan Nasional	A.1.a. Jumlah judul Publikasi Hasil Penyusunan Statistik Pendapatan Nasional (PDB)		-	-	-
	N. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran	N.1. Publikasi Neraca Pengeluaran	N.1.a Persentase penyajian/ release data dan informasi Neraca Pengeluaran hari kerja ke 5 pada bulan kedua setelah triwulan berakhir		100%	100%	100%

No	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	Satuan	TARGET		
					2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)		(7)	(8)	(9)
			N.1.b Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan Neraca Pengeluaran		100%	100%	100%
			N.1.c Jumlah judul Publikasi Neraca Pengeluaran yang mempunyai ISSN/ISBN		-	-	-
	O. Pengembangan dan Analisis Statistik	O.1. Publikasi Pengembangan dan Analisis Statistik	O.1.a Jumlah judul Publikasi Analisis Statistik		-	-	-
			O.1.b Jumlah judul Publikasi Konsistensi Statistik		-	-	-
			O.1.c Jumlah judul Publikasi Konsistensi Statistik		-	-	-
			O.1.d Jumlah judul Publikasi Pengembangan Model Statistik		-	-	-
			O.1.e Jumlah fungsional statistisi dengan kualifikasi tingkat ahli		2	2	6
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS						
	3. Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja	3.A. Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja	3.A.1. Jumlah Satker yang mempunyai situs web yang terhubung secara online		15	15	15

No	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	Satuan	TARGET		
					2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)		(7)	(8)	(9)
	3.4 Peningkatan Kuantitas Sarana dan Prasarana TIK serta Sarana dan Prasarana Kerja Lainnya	Meningkatnya Kuantitas Sarana dan Prasarana TIK serta Sarana dan Prasarana Kerja Lainnya	3.4.1. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana TIK yang memadai		89%	91%	93%
			3.4.2. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kerja lainnya yang memadai		84%	86%	88%
	A. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Serta Operasional Perkantoran Lainnya	1. Kendaraan Bermotor	1. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kerja lainnya di BPS Pusat		96%	96%	96%
		2. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	2. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana TIK yang memadai di BPS Pusat		96%	98%	98%
	B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi	1. Kendaraan Bermotor	1. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kerja lainnya kantor BPS Provinsi/ Kabupaten/Kota		77%	80%	83%
		3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	2. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana TIK yang memadai di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota		83%	85%	89%
3	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) BPS						

No	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	Satuan	TARGET		
					2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)		(7)	(8)	(9)
	3.2 Peningkatan Kualitas Komunikasi BPS Pusat dengan BPS Daerah	Meningkatnya Kualitas Komunikasi BPS Pusat dengan BPS Daerah	3.2.1. Banyaknya Tayangan secara langsung Berita Resmi Statistik data nasional oleh BPS Provinsi		17	17	17
			3.2.2. Banyaknya penggunaan Video Conference untuk rapat teknis BPS Pusat dengan BPS Daerah		26	26	26
	3.3 Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana TIK serta Sarana dan Prasarana kerja lainnya	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana TIK serta Sarana dan Prasarana Kerja Lainnya	3.3.1 Persentase sarana dan prasarana TIK dalam kondisi yang baik		100%	100%	100%
			3.3.2 Persentase sarana dan prasarana kerja lainnya dalam kondisi yang baik		100%	100%	100%
	4. Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan	4.A. Meningkatkan kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan	4.A.1. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Srata I		60%	60%	63%
			4.A.2. Penilaian Kemenpan-RB terhadap reformasi birokrasi BPS sesuai dengan eselon		65	70	73
	4.1 Meningkatkan Kapasitas sumber daya manusia	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia	4.1.1. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Srata I		60	60	63
			4.1.2. Persentase pejabat yang sudah pernah		75%	75%	75%

No	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	Satuan	TARGET		
					2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)		(7)	(8)	(9)
			mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon				
			4.1.3. Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu		29	29	29
			4.1.4. Persentase pegawai BPS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional		35%	35%	35%
	4.3 Penataan Kelembagaan dalam Rangka Reformasi Birokrasi dan Mewujudkan Good Governance	Terwujudnya Good Governance pada Reformasi Birokrasi BPS	4.3.1. Jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (Academic Paper)		--	-	-
			4.3.2. Penilaian Kemenpan-RB terhadap reformasi birokrasi BPS		-	-	-
	4.4 Peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan	Meningkatnya akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan	4.4.1. Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK		WTP	WTP	WTP
			4.4.2 Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS oleh Kemenpan-RB		65	70	73

No	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	Satuan	TARGET		
					2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)		(7)	(8)	(9)
			4.4.3 Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ke Bappenas		-	-	-
	A. Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran	A.1. Dokumen Perencanaan	A.1.a. Jumlah dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran yang disetujui dan disahkan oleh instansi yang berwenang		12	12	12
			A.1.b. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS oleh Kemen PAN dan RB		65	70	73
	B. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan	B.1. Layanan Perkantoran	B.1.a. Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK		WTP	WTP	WTP
		B.2. Layanan Administrasi Keuangan	B.2.a. Jumlah laporan kegiatan Administrasi Keuangan		12	12	12
	C. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian	C.1. Layanan Administrasi Kepegawaian	C.1.a. Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu		29	29	29
			C.1.b. Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV/Strata 1		70%	75%	80%
			C.1.c. Persentase pemuktahiran data sistem informasi kepegawaian		100%	100%	100%

No	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	Satuan	TARGET		
					2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)		(7)	(8)	(9)
	D. Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum	D.1. Layanan Kehumasan, Hukum, dan Hubungan Kelambagaan	D.1.a. Banyaknya penyelenggaraan sosialisasi kegiatan BPS		20	20	20
			D.1.b. Banyaknya kunjungan tamu dari dalam dan luar negeri ke BPS		1020	1020	1100
			D.1.c. Jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (Academic Paper)		-	-	-
	E. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara BPS	E.1. Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS	E.1.a. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan		-	-	-
			E.1.b. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional statistisi dan pranata komputer		-	-	-
	F. Pelayanan Internal Perkantoran dan Kepegawaian	F.1. Satker yang Telah Menyelenggarakan Sosialisasi Reformasi Birokrasi	F.1.a. Jumlah dokumen reformasi birokrasi		-	-	-
	G. Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)	G.1. Layanan Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik	G.1.a. Jumlah mahasiswa yang lulus program pendidikan D IV		-	-	-
			G.1.b. Jumlah penelitian dosen		-	-	-

No	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	Satuan	TARGET		
					2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)		(7)	(8)	(9)
	H. Dukungan Manajemen BPS Lainnya	H.1. Layanan Perkantoran	H.1.a. Persentase kondisi sarana teknologi informasi dan komunikasi yang baik		100%	100%	100%
		H.2. Layanan Penatausahaan BMN	H.2.a. Persentase sarana dan prasarana kerja lainnya dalam kondisi yang baik		100%	100%	100%
			H.2.b. Persentase satker yang melakukan implementasi SIMAK-BMN dengan kategori baik		15	15	15
4.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara (P2A2N) BPS						
	4.2. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	4.2.A Meningkatnya kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	4.2.1. Jumlah laporan monitoring tindak lanjut hasil audit.		-	-	-
			4.2.2. Jumlah fungsional Auditor		-	-	-
			4.2.3. Persentase Satker yang diaudit		-	-	-
			4.2.3. Persentase Sakip yang dievaluasi		-	-	-
	A. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas	A.1. Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Wilayah I	A.1.a Jumlah laporan hasil audit Wilayah I		-	-	-

No	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	Satuan	TARGET		
					2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)		(7)	(8)	(9)
	Inspektorat I						
			A.1.b Jumlah evaluasi hasil audit Wilayah I		-	-	-
			A.1.c Jumlah laporan monitoring tindak lanjut hasil audit Wilayah I		-	-	-
	B. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II	B.1. Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Wilayah II	B.1.a Jumlah laporan hasil audit Wilayah II		-	-	-
			B.1.b Jumlah evaluasi hasil audit Wilayah II		-	-	-
			B.1.c Laporan monitoring tindak lanjut hasil audit Wilayah II		-	-	-
	C. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III	C.1. Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Wilayah III	C.1.a Jumlah laporan hasil audit Wilayah III		-	-	-
			C.1.b Jumlah evaluasi hasil audit Wilayah III 1		-	-	-
			C.1.c Laporan monitoring tindak lanjut hasil audit Wilayah III		-	-	-

Tabel 2. Alokasi Anggaran 2010-2014 Menurut Program

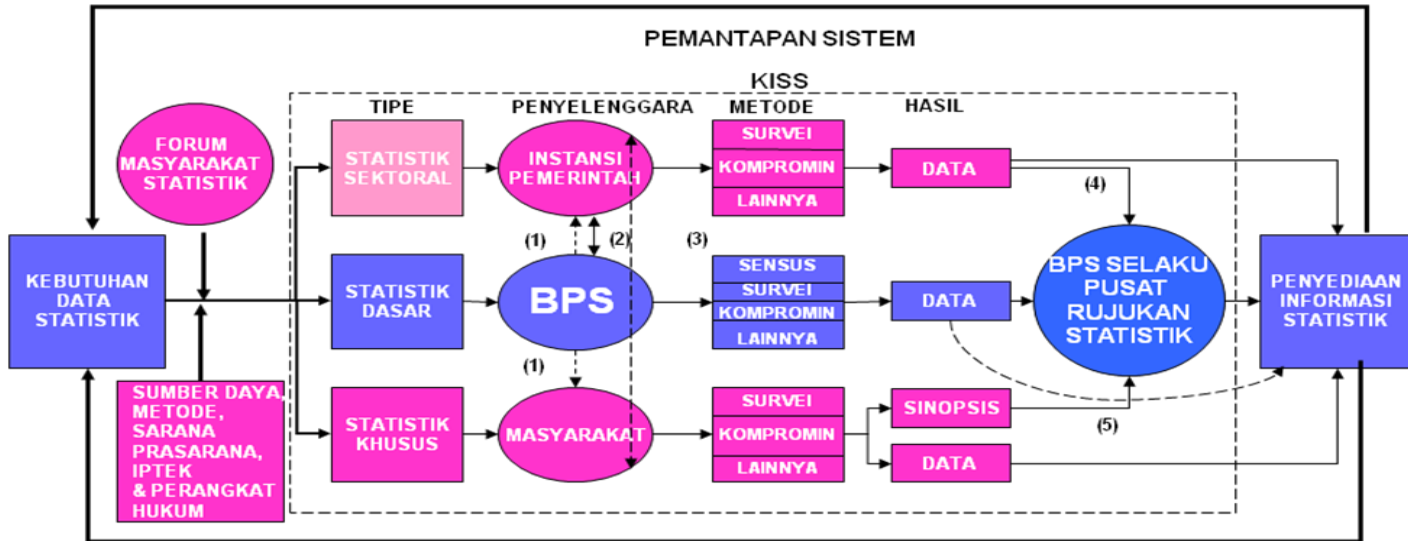
(Juta Rupiah)

PROGRAM/KEGIATAN (1)	ALOKASI				
	2010 (2)	2011 (3)	2012 (4)	2013 (5)	2014 (6)
A. ALOKASI PROGRAM TEKNIS	3.769.067	945.641	811.881	2.178.267	1.572.169
I. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS)	3.769.067	945.641	811.881	2.178.267	1.572.169
- Sensus Penduduk 2010	3.300.000	25.000	15.187	-	-
- Survei Biaya Hidup 2012	-	9.358	104.815	23.997	12.442
- Survei Diagram Timbangan NTP 2012	-	15.000	122.785	33.703	13.258
- Sensus Pertanian 2013	-	6.979	119.684	1.641.947	238.606
- Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)	-	350.000	-	-	713.000
- SUPAS 2015	-	-	-	-	10.000
- Sensus Ekonomi 2016	-	-	-	-	5.000
- Teknis Lainnya	469.067	539.304	449.410	478.620	579.863
B. ALOKASI PROGRAM GENERIK	1.279.981	1.076.733	1.145.932	1.178.375	1.211.898
I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	915.132	819.618	887.140	987.863	1.019.624
- Statcap Cerdas (PHLN)	15.000	35.300	81.000	150.000	160.000
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS	359.741	251.876	253.423	185.009	186.634
III. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Aparatur Negara (P2A2N) BPS	5.109	5.238	5.369	5.503	5.640
TOTAL	5.049.048	2.022.373	1.957.813	3.356.642	2.784.067

Lampiran 3.

Sistem Statistik Nasional

SISTEM STATISTIK NASIONAL



KETERANGAN

KISS : Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Standarisasi.

KOMPROMIN: Kompilasi Produk Administrasi.

- (1): BPS mengkoordinasikan Penyelenggaraan Statistik
- (2): Instansi Pemerintah memberitahukan rancangan survei dan BPS memberikan Rekomendasi
- (3): Instansi Pemerintah dan masyarakat saling berkoordinasi dan kerjasama
- (4): Instansi Pemerintah menyerahkan hasil ke Pusat Rujukan Statistik
- (5): Masyarakat menyerahkan Sinopsis ke Pusat Rujukan Statistik

Lampiran 4.

Peraturan Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 243 Tahun 2012 Tentang Rencana Strategis BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2014



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 243 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH TAHUN 2010 – 2014

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan data statistik yang berkualitas, lengkap, akurat, mutakhir dan berkesinambungan sebagai acuan dasar dalam perencanaan pembangunan nasional, maka Badan Pusat Statistik perlu menyusun perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan dalam lima tahun ke depan melalui Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 197 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
1. 4. Undang-undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010-2014.

Pasal 1

Rencana Strategis pada badan Pusat Statistik Tahun 2010 – 2014 yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut sebagai Renstra BPS tahun 2010-2014, memuat gambaran umum situasi perstatistikan nasional, visi, misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan pembangunan statistik serta program dan kegiatan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 2

- (1) Renstra BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2014 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan target dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014 bidang statistik dan digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah bidang statistik selama kurun waktu 2010-2014
- (2) Renstra BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pedoman bagi instansi vertikal BPS dalam menyusun Renstra pada masing-masing instansi vertikal BPS tersebut.
- (3) Penyusun Renstra pada instansi vertikal BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2014 harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 3
Renstra BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2014
sebagaimana tersebut dalam lampiran ini.

Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 20 Juni 2012

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



PANUSUNAN SIREGAR
NIP. 19580314 198302 1 001